

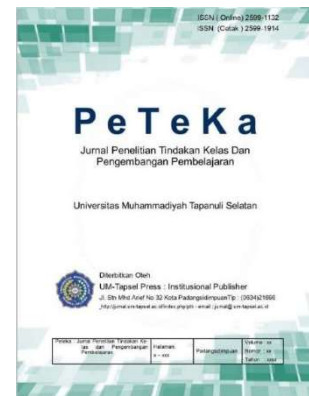
**PeTeKa (Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Pembelajaran)**

Issn Cetak : 2599-1914 | Issn Online : 2599-1132 | Vol. 8 No. 1 (2025) | 18-25

DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/ptk.v8i1.18-25>**HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN**

Aprilliantoni\*, Sri Wahyuni, Muhammad Iqbal

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia.

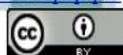
\*e-mail: [aprilliantoni@unismabekasi.ac.id](mailto:aprilliantoni@unismabekasi.ac.id)

**Abstrak.** Penelitian ini membahas hubungan pendidikan dan pembangunan nasional di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan dan prioritas perencanaan yang diambil oleh pemerintah. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, namun juga sebagai penggerak utama pembangunan sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas kebijakan pendidikan untuk mendukung pembangunan nasional serta tantangan yang dihadapi dan implementasinya. Penelitian ini membahas hubungan pendidikan dan pembangunan nasional, dengan penekanan pada prioritas kebijakan dan perencanaan. Pendidikan karakter dan peningkatan mutu pendidikan merupakan program utama kebijakan pembangunan. Melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan diharapkan dapat tercipta sistem pendidikan yang disesuaikan dengan tantangan global. Penelitian ini juga menganalisis strategi perencanaan pendidikan yang sejalan dengan visi pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan pembelajaran deskriptif dan relasional untuk mengetahui hubungan pendidikan dengan pembangunan nasional di Indonesia dengan kualitas pendidikan. Data akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan prioritas perencanaan yang diambil pemerintah mempunyai dampak signifikan terhadap mutu pendidikan, berpengaruh positif terhadap mutu pendidikan dan peningkatan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Pembangunan nasional, Kebijakan, Perencanaan.

**Abstract.** This study discusses the relationship between education and national development in Indonesia, focusing on the policies and planning priorities undertaken by the government. In this context, education serves not only as a means of knowledge transfer but also as a key driver of social and economic development. The research aims to identify educational policy priorities to support national development, as well as the challenges faced and their implementation. The study examines the relationship between education and national development, emphasizing policy and planning priorities. Character education and improving education quality are the main programs of the development policy. Through synergy between the government and educational institutions, it is expected that an education system aligned with global challenges can be established. This research also analyzes education planning strategies that align with the development vision. The study employs a descriptive and relational learning approach to explore the relationship between education and national development in Indonesia with the quality of education. Data will be analyzed using descriptive statistics and correlation analysis. The findings reveal that government policies and planning priorities have a significant impact on the quality of education, positively influencing education quality and improving learning outcomes, creating a better learning environment for students.

**Keywords:** Education, National development, Policy, Planning.



## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional. Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kebijakan tersebut meliputi perluasan akses pendidikan, revitalisasi pendidikan vokasi, penguatan pendidikan karakter, dan peningkatan kualitas guru.

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan nasional suatu negara. Di Indonesia, pendidikan bukan sekedar berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, namun juga sebagai penggerak utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan sosial ekonomi.

Hubungan antara pendidikan dan pembangunan nasional semakin ditekankan melalui berbagai kebijakan dan rencana yang dilaksanakan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika tantangan global semakin kompleks, kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah tidak hanya bertujuan untuk menciptakan generasi terpelajar, namun juga mengembangkan karakter dan keterampilan yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Oleh karena itu, strategi perencanaan pendidikan sangatlah penting untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, dimana pendidikan karakter dan peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda utama. Dalam konteks ini, sinergi antara lembaga pendidikan dan pemerintah menjadi kunci penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Dengan kebijakan dan perencanaan yang tepat,

diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pendidikan sebagai pilar pembangunan, pendidikan dalam konteks pembangunan nasional merujuk pada proses pembelajaran yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan individu, tetapi juga untuk membangun kapasitas masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas (Alisjahbana, A.S. 2000).

Hal ini mencakup pengembangan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif terhadap pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini akan membahas secara mendalam hubungan antara pendidikan dan pembangunan nasional, dengan penekanan khusus pada kebijakan dan rencana yang diambil oleh pemerintah, serta tantangan dan implementasi yang dihadapi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder dari dokumen kebijakan pemerintah, laporan penelitian, dan artikel terkait. Data dikumpulkan dari sumber-sumber terpercaya untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kebijakan pendidikan di Indonesia. Studi deskriptif-korelasional akan digunakan untuk membahas hubungan pendidikan dan pembangunan nasional di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan dan prioritas perencanaan yang diambil oleh pemerintah.

### **1) Populasi dan Sampel:**

- a) Populasi: Guru dan siswa dari SD Se- Kota Bekasi.

- b) Sampel: 300 siswa dan 30 guru secara acak dari SD Se- Kota Bekasi.
- 2) Instrumen Penelitian:
- a) Kuesioner untuk siswa: Untuk mengukur tingkat hubungan pendidikan dan pembangunan nasional di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan dan prioritas perencanaan yang diambil oleh pemerintah.
- b) Kuesioner untuk guru: Mengevaluasi pengalaman dan persepsi guru terhadap hubungan pendidikan dan pembangunan nasional di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan dan prioritas perencanaan yang diambil oleh pemerintah.
- 3) Prosedur Pengumpulan Data:
- a) Distribusi kuesioner kepada siswa dan guru yang terpilih.
- b) Pengumpulan data akan dilakukan dalam waktu dua minggu.
- c) Data akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan analisis korelasi.
- 4) Analisis Data:
- a) Analisis deskriptif: Untuk mengidentifikasi tingkat hubungan pendidikan dan pembangunan nasional di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan dan prioritas perencanaan yang diambil oleh pemerintah.
- b) Analisis korelasi: Untuk mengetahui hubungan antara variabel pendidikan dan pembangunan nasional di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan dan prioritas perencanaan yang diambil oleh pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan pendidikan dan pembangunan nasional di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan dan prioritas perencanaan yang diambil oleh pemerintah. memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mutu pendidikan di SD Se-Kota Bekasi. Secara keseluruhan, kebijakan dan prioritas perencanaan yang diambil oleh pemerintah. secara strategis di Sekolah Dasar, Kota Bekasi, memainkan peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan mendorong lingkungan belajar yang dinamis, inklusif, dan berwawasan ke depan, kebijakan dan perencanaan pendidikan mendukung misi sekolah untuk menyediakan pengalaman pendidikan yang luar biasa dan mempersiapkan siswa untuk kesuksesan di masa depan, serta telah mendorong peningkatan kualitas pembelajaran terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah (Tilaar, H.A.R. 2004). Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa kebijakan dan prioritas perencanaan yang diambil oleh pemerintah. di Sekolah Dasar Se- kota Bekasi mampu meningkatkan mutu pembelajaran. Temuan analisis menunjukkan bahwa :

- 1) Prioritas Kebijakan Pendidikan
- a) Perluasan Akses Pendidikan: Pemerintah berkomitmen untuk memastikan semua anak di Indonesia memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu langkah untuk mendukung siswa dari keluarga kurang mampu.
- b) Revitalisasi Pendidikan Vokasi: Fokus pada peningkatan keterampilan generasi muda agar sesuai dengan tuntutan pasar

kerja. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, pemerintah mendorong revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja.

- c) Penguatan Pendidikan Karakter: Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai fondasi moral dan etika bagi siswa.
  - d) Peningkatan Kualitas Guru: Kebijakan ini mencakup pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru untuk memastikan mereka dapat memenuhi tuntutan pembelajaran.
- 2) Tantangan dalam Implementasi**
- a) Keterbatasan Sumber Daya: Banyak daerah, terutama yang terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya pendidikan yang memadai.
  - b) Kualitas Pembelajaran: Meskipun akses telah diperluas, kualitas pembelajaran masih menjadi tantangan utama. Pengukuran pembelajaran secara berkala diperlukan untuk memastikan siswa menguasai keterampilan dasar.
  - c) Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Keselarasan antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat daerah sering kali tidak berjalan dengan baik, sehingga mempengaruhi efektivitas program pendidikan. Peningkatan Keterlibatan dan Motivasi Siswa

Pendidikan memiliki peran krusial dalam pembangunan nasional Indonesia. Kebijakan yang telah ditetapkan menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, tantangan

dalam implementasi tetap ada dan memerlukan perhatian lebih lanjut dari semua pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu adanya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah serta dukungan dari Masyarakat (Ghozali, A. 2000).

Berikut adalah tantangan terbesar dalam menerapkan keempat skala prioritas pendidikan yang ditetapkan pemerintah:

- 1) Memperluas Akses Pendidikan**
  - a) Kesesuaian Akses: Memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T)
  - b) Infrastruktur dan Fasilitas: Mengatasi kendala infrastruktur dan kurangnya fasilitas pendidikan di beberapa wilayah, sehingga mempersulit pencapaian target pendidikan universal.
- 2) Revitalisasi Pendidikan Vokasi**
  - a) Keterampilan Generasi Bangsa: Membekali generasi bangsa 2045 dengan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini memerlukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja (Fattah, 2000).
  - b) Integrasi dengan Dunia Nyata: Mengintegrasikan kurikulum dengan kebutuhan dunia nyata, sehingga kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan integrasi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang relevan.
- 3) Penguatan Pendidikan Karakter**
  - a) Implementasi Payung Hukum: Menguatkan pendidikan karakter melalui payung hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, yang menspesifikan

bahwa seluruh kekuatan di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus bersama-sama menyukseskan pendidikan karakter.

**4) Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik**

- a) Kompetensi dan Kualifikasi: Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Hal ini memerlukan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan tenaga kependidikan.
- b) Beban Kerja dan Fungsi Guru: Mengurangi beban kerja guru agar mereka dapat berperan sebagai pendidik yang lengkap, bukan hanya sebagai pengajar. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 telah mengubah beban kerja guru untuk memfasilitasi peran mereka yang lebih luas. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pendidikan.

Tantangan terbesar dalam menerapkan keempat skala prioritas pendidikan adalah mengatasi kesenjangan akses, meningkatkan keterampilan generasi bangsa, mewujudkan pendidikan karakter yang kuat, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Setiap skala prioritas memerlukan upaya yang berkelanjutan dan koordinasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, beberapa langkah strategis dapat diambil berdasarkan tantangan yang ada. Berikut adalah cara-cara yang dapat diterapkan:

**1) Peningkatan Infrastruktur Pendidikan**

- a) Pembangunan Fasilitas Sekolah : Membangun dan memperbaiki gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium agar memenuhi standar yang layak untuk proses belajar mengajar.
- b) Akses Internet : Menyediakan akses internet yang memadai untuk mendukung pembelajaran digital dan akses informasi.

**2) Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- a) Pelatihan Guru: Mengadakan program pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan metode pengajaran mereka. Hal ini termasuk pelatihan dalam penggunaan teknologi dalam Pendidikan.
- b) Rekrutmen dan Insentif: Memberikan insentif kepada guru agar mau mengajar di daerah terpencil, seperti tunjangan khusus dan fasilitas tempat tinggal.

**3) Kurikulum yang Relevan**

- a) Penyesuaian Kurikulum: Mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan konteks daerah terpencil. Ini termasuk penyediaan materi pembelajaran yang relevan dan berbasis digital.
- b) Sumber Belajar Digital: Memanfaatkan teknologi untuk menyediakan sumber belajar digital yang dapat diakses secara offline, sehingga siswa tetap dapat belajar meskipun tanpa koneksi internet.

**4) Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi**

- a) Kemitraan dengan Komunitas : Membangun kolaborasi antara

pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, dan masyarakat lokal untuk mendukung pendidikan. Program berbasis komunitas dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya Pendidikan.

- b) Dukungan Moral dan Sosial : Meningkatkan dukungan moral dari masyarakat terhadap pendidikan, sehingga anak-anak termotivasi untuk belajar dan bersekolah.

**5) Program Beasiswa dan Bantuan Keuangan**

- a) Bantuan Biaya Sekolah: Memberikan beasiswa atau bantuan biaya sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengurangi hambatan finansial dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil memerlukan pendekatan multifaset yang melibatkan peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, penyesuaian kurikulum, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan finansial. Dengan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua anak di Indonesia, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil (Arikanto, S. 2006).

**Analisis Dampak Kebijakan:** Evaluasi kebijakan pendidikan yang ada perlu dilakukan secara sistematis untuk mengukur dampak terhadap kualitas pendidikan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Hal ini mencakup pengumpulan data, analisis hasil, dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan untuk perbaikan berkelanjutan.

**Rekomendasi Perbaikan:** Berdasarkan hasil evaluasi, penting untuk merumuskan rekomendasi yang

jelas dan terukur guna meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan. Rekomendasi ini harus mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program pendidikan.

## **SIMPULAN**

Pendidikan adalah suatu proses sistematis untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia secara umum dan mewujudkan tiga dimensi fundamental kemanusiaan: (1) Pengaruh terhadap nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlak yang baik, dan kemampuan keindahan, termasuk keutamaan dan kualitas unggul; (2) Kecerdasan yang diwujudkan dalam kemampuan berpikir dan daya intelektual untuk menemukan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) Keterampilan psikomotorik sebanyak tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, keterampilan praktis, dan keterampilan kinestetik yang dapat dikembangkan secara efektif (Arifin, A. 2003). Oleh karena itu, upaya peningkatan akses universal terhadap pendidikan yang bermutu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Indonesia Tahun 1945, yaitu sesuai dengan tujuan melestarikan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan turut serta dalam terselenggaranya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan.

Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, bahwa hubungan pendidikan dan pembangunan nasional di Indonesia, dengan fokus pada

kebijakan dan prioritas perencanaan yang diambil oleh pemerintah adalah: (1) Pendidikan sebagai Katalis Pembangunan: Temuan menunjukkan bahwa pendidikan berfungsi sebagai katalisator utama dalam pembangunan nasional, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (2) Kebijakan Pendidikan yang Efektif: Kebijakan pendidikan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terbukti meningkatkan kualitas pendidikan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. (3) Tantangan dan Peluang: Penelitian mengidentifikasi tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan pendidikan, namun juga menyoroti peluang untuk inovasi dan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mencapai hasil yang lebih baik. (4) Penguatan Kerjasama Multi-Pihak: Diperlukan penguatan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan dana yang memadai, pelatihan bagi pendidik, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan perkembangan industri dan teknologi. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat secara signifikan, mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. (5) Fokus pada Inovasi Pendidikan: Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi inovasi dalam metode pengajaran dan teknologi pendidikan yang dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta dampaknya terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, S. (n.d.). Alifah, S. 2021. "Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Mengejar Ketertinggalan Dari Negara Lain". *Cermin: Jurnal Penelitian*, 5(1), hlm 113–123. [https://doi.org/10.36841/cermin\\_unars.v5i1.968](https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v5i1.968).
- Alisjahbana, A.S. 2000. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Pendidikan". Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Arifin, A. 2003. "Paradigma Baru Pendidikan Nasional". Jakarta: Balai Pustaka.
- Arikanto, S. 2006. "Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktik". Jakarta: Rineka Cipta.
- Bappenas. 2018. "Rencana Aksi Daerah Provinsi Jawa Barat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGS)" 2018-2023.
- Fattah, N. 2000. "Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ghozali, A. 2000. "Analisis Biaya Manfaat SMU Dan SMK", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol.2, No. 022.
- Hari Sudrajat. 2005. "Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)". Bandung: CV. Cipta Cekas Grafika.
- Kemendikbud 2014. "Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, (Education Development)". Implementasi dan Kisah Sukses.
- Supriadi, D. 2004. "Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah". Cetakan Kesembilan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

**Aprilliantoni, dkk.** Hubungan Pendidikan Dan Pembangunan Nasional Dengan...

Suryadi, A. 2002. "Pendidikan, Investasi SDM, Dan Pembangunan". Jakarta: Balai Pustaka.

Tilaar, H.A.R. 2004. "Paradigma Pendidikan Nasional". Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.

Tirtosudarmo, R. 1994. "Dinamika Pendidikan Dan Ketenagakerjaan Pemuda Di Perkotaan Indonesia". Jakarta: PT. Grasindo.